

Transformasi Sosial Pribumi Depok Tahun 1930-1960

Asep Suryana¹

Abstract

The article deals with the social transformation of the indigenous people of Depok from 1930 until 1960. Substantially, the social transformation had made public sphere of the indigenous people of Depok wider, and it produced their new structure of socioeconomic significantly. In this context, they were so selective in their adaptation processes. Actually, the patterns of their adaptation had rational calculation itself that based on subsistence principles.

Pengantar

Artikel ini mengetengahkan kehidupan sosial ekonomi Pribumi Depok saat terjadi peralihan posisi sosial atau transformasi sosial dari era kolonial Belanda, masa pendudukan Jepang, hingga era kemerdekaan dalam kurun tahun 1930-1960. Argumentasi yang dikembangkan berpijak pada gagasan bahwa transformasi sosial tersebut telah memperluas ruang gerak sosial politik kaum Pribumi Depok, dan pada gilirannya, perluasan ruang gerak sosial politik tadi berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi sehari-hari mereka. Untuk mengungkap tujuan tersebut, artikel ini bertumpu pada dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pola penyesuaian diri Pribumi Depok saat menghadapi perubahan tiga zaman di atas? dan, kedua, apa dampak perubahan posisi sosial tersebut terhadap kehidupan sosial ekonomi Pribumi Depok di masing-masing zaman?.

¹ Staf Pengajar Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Untuk menjawab pertanyaan di atas, artikel ini dibagi dalam enam bagian. Bagian pertama adalah uraian tentang pengertian konsep transformasi sosial, yaitu konsep kunci artikel ini. Bagian kedua berisikan argumen bahwa Pribumi Depok adalah segmen sosio-demografis yang patut kita teliti. Mereka berada dalam situasi yang ringkih, dan hal itu bermula pada era kolonial saat Depok masih berstatus tanah partikelir. Bagian ketiga berisikan bentuk-bentuk eksploitasi yang dialami oleh Pribumi Depok melalui dua ranah, yakni ranah individual (oleh Orang Depok Asli) dan ranah kelembagaan (oleh Badan Pengurus Tanah Partikelir).

Selanjutnya dalam bagian keempat, eksploitasi tersebut---yang beriringan dengan proses monoteisasi---semakin parah tatkala Malaise tahun 1930. Kerja upahan, misalnya, yang berfungsi menyediakan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar pajak menjadi terhenti, padahal mereka tetap saja diwajibkan membayar pajak tertentu kepada Badan Pengurus Tanah Partikelir Depok. Pola respon dan adaptasi yang dilakukan oleh Pribumi Depok kita diskusikan pada bagian kelima, dimana Pribumi Depok tampaknya amat berhati-hati dalam melakukan respon dan adaptasinya itu. Sementara, isyarat bahwa pola adaptasinya itu bertumpu kepada etika subsistensi kita bicarakan pada bagian penutup. Etika subsistensi ini merupakan landasan suatu prinsip yang mereka jadikan pedoman tatkala melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan mendasar dalam kurun tahun 1930-1960.

Konsep Transformasi Sosial

Secara bebas, transformasi sosial dapat dialihbahasakan sebagai peralihan posisi sosial. Peralihan tersebut terjadi lantaran tersusun ulangnya suatu tatanan sosial. Bahkan dalam bentuk yang ekstrim, transformasi sosial dapat pula berwujud pembalikan sosial. Struktur sosial suatu masyarakat dapat saja menjadi terbalik. Lapisan atas suatu masyarakat yang awalnya demikian *digjaya*, memegang kendali kekuasaan (*powerfull*), memegang hegemoni budaya (*prestise*), dan memiliki pelbagai *privilege*, pada fase selanjutnya dapat saja terpuruk, bahkan meminjam istilah Wertheim -- menjadi “pariah”.

Pemahaman konsep transformasi di atas terkait dengan makna etimologisnya dan penggunaan konsep tersebut dalam disiplin linguistik. Transformasi berasal dari kata *trans* dan *formation*. *Trans* berarti *beyond*, *across*, sedangkan *formation* berarti bentuk, tatanan, atau struktur (Dagun, 1997: 1150; Stein dan Urdang, 1968: 1.394-5; dan Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995).

Jadi secara harfiah, transformasi sosial berarti melampui bentuk lama², atau melampui struktur sosial yang lama. Dalam konteks artikel ini, kita menggunakan pengertian yang kedua. Transformasi sosial ialah tersusun ulangnya kembali suatu tatanan sosial. Dalam proses tersebut, strata terbawah mengalami mobilitas vertikal atau beralih posisi sosialnya menjadi lebih tinggi dalam sistem pelapisan sosial yang baru terbentuk.

Penggunaan konsep transformasi dalam disiplin linguistik juga semakin meyakinkan pengertian konsep transformasi sosial yang kita gunakan. Dalam disiplin ini, konsep transformasi adalah peralihan struktur kalimat yang berbeda antara yang awal dengan yang kemudian. Misalnya, peralihan dari struktur kalimat aktif ke kalimat pasif. Tentu saja dalam peralihan kalimat tersebut, strukturnya berubah sama sekali. Subjek dapat menjadi objek. Sebaliknya objek menjadi subjek kalimat. Fungsi gramatikal dalam struktur kalimat tersebut menjadi tersusun ulang, dan berbeda antara yang pertama dengan yang kemudian.

Dalam konteks artikel ini, penggunaan konsep transformasi sosial di atas juga melibatkan komponen turunan, yakni konsep penyesuaian (*adjustment* dan adaptasi). Kedua konsep ini --yang pengertiannya saling berkaitan—merujuk pada respon aktif Pribumi Depok sehari-hari terhadap kehidupan sosial ekonomi yang tiba-tiba saja berubah, karena bergesernya struktur politik di tingkat makro. Dengan demikian, konsep ini mensyaratkan kemampuan warga komunitas tersebut untuk menafsirkan kehidupan sosial ekonomi mereka yang berubah itu, dan atas dasar tafsirannya itu, mereka mengambil tindakan tertentu sebagai jalan keluar terbaik yang mereka anggap paling rasional.

² Untuk contoh studi yang menggunakan konsep transformasi dalam pengertian ini, lihat Said, 2002.

Pribumi Depok yang Ringkih

Pribumi Depok merupakan lapisan penduduk bekas tanah partikelir Depok yang memiliki peran sangat penting baik di masa kini maupun masa lalu. Segmen sosio-demografis tersebut saat ini berperan signifikan dalam proses suburbanisasi Depok sehingga menjadikannya sebagai salah satu penyangga utama Jakarta yang posisinya setara dengan Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Suryana, 2003). Pribumi Depok tidak saja telah menyediakan infrastruktur sosial ekonomi sebelum para migran bermukim di sana. Tetapi mereka juga telah bersedia mengalihfungsikan lahan yang merupakan mata pencahariannya itu, menjadi permukiman para migran. Pada sudut lain, kita pun menjumpai kenyataan bahwa sebagian Pribumi Depok tersebut sangat tertatih-tatih dalam mengikuti irama pengkotaan Depok yang semakin lama semakin cepat. Dalam aspek mata pencaharian, misalnya Pribumi Depok yang tinggal di pinggiran kota masih saja berkutat dengan pertanian, padahal luas lahan pertanian mereka semakin menyusut, beralih fungsi menjadi permukiman para pendatang. Begitu pula Pribumi Depok yang tinggal di jantung kota, juga sama rentannya. Mereka masih bergelut dalam sektor ekonomi informal dan usaha kecil-menengah, dan agaknya mereka *emoh* memasuki sektor formal-negara maupun formal-swasta³.

Agaknya posisi yang marjinal di atas memiliki akar sejarah yang panjang, dan hal itu dapat kita lacak pada kehidupan mereka saat Depok masih merupakan tanah partikelir di zaman kolonial Belanda dahulu. Pemilik tanah partikelir Depok bukanlah perorangan, melainkan dimiliki secara kolektif oleh komunitas yang menyebut diri sebagai Orang Depok Asli, atau orang luar menyebutnya –istilah yang berkonotasi negatif – sebagai “Belanda Depok”. Kepemilikan tanah partikelir ini merupakan hibah dari Cornelis Chastelein, pemilik tanah

³ Untuk menggambarkan betapa marjinalnya keterlibatan Pribumi Depok dalam proses suburbanisasi ini, lihat Kano, 2004 dan Partrijunianti et.al., 1992. Menurut hasil penelitian Kano, segmen sosio-demografis yang kita konseptualisasikan sebagai Pribumi Depok ini merupakan Betawi pinggiran, meski secara administratif mereka tinggal di wilayah Jawa Barat. Mereka pada dasarnya adalah penduduk asli Depok yang telah tinggal di sana sebelum Depok menjadi tanah partikelir di masa VOC.

partikelir Depok sebelumnya. Untuk mengelola tanah partikelir tersebut sehari-hari, Orang Depok Asli membentuk semacam pemerintahan lokal yang bernama Badan Pengurus Tanah Partikelir Depok atau disebut juga *Gemente Bestuur*. Kepala pemerintahannya bergelar presiden, yang dipilih tiga tahun sekali oleh dan diantara mereka sendiri.

Peran Pribumi Depok yang sangat signifikan tersebut ternyata bertentangan dengan realitas sosialnya. Pribumi Depok sesungguhnya berada di strata terbawah dalam struktur sosial. Mereka secara sosial, ekonomi, dan politik berada di bawah bayang-bayang pemilik tanah partikelir Depok, Orang Depok Asli. Mereka pun dianggap bukan pemilik tanah yang sah, meski saat Cornelis Chastelein membeli hamparan perkebunan seluas 1.244 hektar tersebut dari tuan tanah Tionghoa, Tio Tiong Ko, pada 18 Mei 1696, diduga kuat mereka telah menetap di sana (Djumhur, 1996, dan Danasasmita, 1983). Pribumi Depok ini tinggal di kampung-kampung, hunian komunitas yang mesti bekerja pada Orang Depok Asli secara perorangan maupun kepada Badan Pengurus Tanah Partikelir. Komunitas mereka dipimpin oleh seorang mandor yang tidak lain adalah aparat Badan Pengurus Tanah Partikelir (Nirmalawati, 1990). Terlihat jelas bahwa perkampungan Pribumi Depok dirancang dalam kerangka penyediaan tenaga kerja bagi fungsi tanah partikelir sebagai penghasil komoditi dan kepentingan ekonomi-politik Orang Depok Asli.

Jarang sekali catatan historis yang menggambarkan Pribumi Depok ini. Walaupun ada informasi tentang kehidupan sosial ekonomi Pribumi Depok, ia selalu digambarkan sebagai pelengkap untuk memperjelas kehidupan keturunan bekas budak Chastelein yang mengklaim diri sebagai Orang Depok asli di atas. Pribumi Depok disebut “Orang Kampung”, untuk mengilustrasikan pola hidup yang sangat kontras dengan Orang Depok Asli: berpola hidup sederhana, terbelakang karena tidak berpendidikan Belanda, bekerja di sektor pertanian, dan mengerjakan tanah para Orang Depok Asli dengan sistem bagi hasil (Marzali, 1975; Nirmalawati, 1990; Poernomo, 1990; Poernomo, 1994).

Sebaliknya, berbagai catatan resmi Pemerintah Belanda selalu saja ditujukan kepada Orang Depok Asli. Sebagai contoh, *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie* (1917) hanya menggambarkan tentang pelbagai segi kehidupan keturunan bekas Budak Chastelein ini pada akhir abad

ke-19 dan awal abad ke-20.⁴ Begitu pula catatan lain tentang Orang Depok Asli juga dilukiskan dalam sensus penduduk tahun 1930. Dalam sensus pertama di negeri kita itu, Orang Depok Asli dikategorikan sebagai etnis sendiri, setara dengan suku bangsa lain, seperti etnis Sunda, Jawa, dan Makasar (Castles, 1967: 166).

Oleh karena itu, agar kita memiliki pengetahuan yang memadai tentang pola respon kalangan Pribumi Depok ini, selayaknya kita mencermati pola-pola penyesuaian dan keterlibatan mereka dalam proses transformasi sosial ekonomi pada awal hingga pertengahan abad ke-20. Bila informasi tentang pola penyesuaian Pribumi Depok masa lalu dapat kita peroleh secara memadai, hal tersebut sangat membantu kita dalam memahami pola-pola penyesuaian dan keterlibatan mereka terhadap gejala-gejala makro yang bermetamorfosis di lingkup kehidupan mereka sehari-hari, terutama saat ini, ketika Depok mengalami proses pengkotaan (*urbanization*) yang semakin cepat sebagai konsekuensi perubahan fungsi penyangganya terhadap Jakarta.

Di Bawah Eksploitasi Tanah Partikelir

Menurut catatan resmi Pemerintah Kota Depok, wilayah tanah partikelir Depok kurang lebih seluas kecamatan Pancoran Mas sekarang, salah satu kecamatan Kota Depok yang paling bersifat *urban* (Pemerintah Kota Depok, 1999). Tanah partikelir Depok merupakan salah satu rangkaian tanah partikelir di selatan *Omlanden Batavia*, yang memanjang dari utara ke selatan, meliputi tanah partikelir Srengseng,

⁴ Sebagai contoh adalah munculnya pelapisan sosial baru di kalangan Orang Depok Asli pada akhir akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pelapisan sosial yang didasarkan pada perbedaan pekerjaan, pendidikan, dan kekayaan ini lahir akibat masuknya sistem pendidikan Belanda ke Depok setelah liberalisasi ekonomi dan politik etnis. Akibatnya, sebagian Orang Depok Asli yang *well educated* mengalami mobilitas vertikal, bekerja di lembaga pemerintahan dan perusahaan swasta di Batavia. Bahkan sebagian ada yang menjadi penglaju harian setelah sistem rel kereta api Batavia-Buitenzorg pada akhir tahun 1880-an berfungsi. Untuk informasi rinci fenomena ini lihat Nirmalawati, 1990 dan Marzali, 1975.

Pondok Cina, Depok, Mampang, Cinere, Citayam, Bojong Gede, dan Cilebut (Kembali, 1990, Pemerintah Kota Depok, 1999). Srengseng dan Depok menjadi tanah partikelir pada era VOC, keduanya milik Cornelis Chastelein, dan terbentuk karena kebijakan VOC agar wilayah tersebut diolah demi keamanan Kota Batavia. Sedangkan tanah partikelir lainnya terbentuk di era pemerintahan Hindia Belanda, khususnya masa pemerintahan Daendels, yang dijual demi menambah kas pemerintah. Pada tahun 1915, terdapat 582 tanah partikelir di seluruh Pulau Jawa, seluas 1.344.853 bau (1 bau = 0,8 ha) dengan 1.832.776 penduduk. Kepemilikan tanah partikelir ini terbagi dalam empat kategori, (1) 171 tanah partikelir dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar dalam bentuk perseroan terbatas, seluas 984.192 bau dengan 1.129.797 penduduk, (2) 68 tanah partikelir dimiliki oleh pengusaha Eropa sebagai pribadi, seluas 136.016 bau dengan 248.018 penduduk, (3) 89 tanah partikelir dimiliki oleh pengusaha Cina, luas 210.563 bau dengan 405.803 penduduk, (4) 154 tanah partikelir dimiliki oleh pengusaha timur Asing, 14.082 bau dengan 49.150 jiwa penduduk (Anwar, 1990: 69). Tanah partikelir Depok termasuk dalam kategori kedua, karena meskipun pemiliknya secara *genetic* bukan orang Eropa, tetapi mereka secara hukum telah memperoleh penyetaraan hak sebagai orang Eropa.

Komunitas Orang Depok Asli memperoleh tanah partikelir Depok setelah Chastelein menghibahkan kepada mereka pada tahun 1714 melalui surat wasiat yang memiliki kekuatan hukum. Kelak, surat wasiat ini menjadi dasar pembentukan tata sosial di Depok, khususnya dalam rangka pembentukan sistem sosial Depok yang bertumpu pada etika Protestan. Tahun 1871, tanah partikelir Depok memiliki status pemerintahan sendiri yang berbadan hukum. Seperti halnya pengaturan sosial di tanah partikelir, sistem pemerintahan di tanah partikelir tersebut mirip seperti negara. Pemilik tanah partikelir tidak hanya berwenang penuh atas tanah tetapi juga berkuasa segalanya atas penduduk yang tinggal di tanah partikelir tersebut. Dalam konteks tanah partikelir Depok, Pribumi Depok dibebani pelbagai pajak (*cuke*; seperti pajak pekarangan, pajak tanaman, pesta dan lain-lain), pengerahan tenaga kerja (*herediensten*), dan kewajiban untuk menanam komoditi yang sedang laku (*contingenten*).⁵ Jadi, seperti halnya ciri tanah

⁵ Menurut Anwar (1990: 54-59) yang melakukan penelitiannya di tanah partikelir Bekasi---dan mungkin saja pola yang relatif sama terjadi di Depok---masih banyak bentuk pungutan lain yang dilakukan oleh tuan

partikelir lain di Pulau Jawa, tanah partikelir Depok pun ditandai oleh dua bentuk eksploitasi dari Badan Pengurus Tanah Partikelir dan Orang Depok Asli secara perorangan. Sistem penyedotan surplus dari Pribumi Depok ini mengukuhkan integrasi Pribumi Depok dalam sistem sosial ekonomi tanah partikelir, dan pada akhirnya membuat Pribumi Depok pun terintegrasi ke dalam sistem sosial ekonomi kapitalis yang lebih luas.

Badan Pengurus Tanah Partikelir atau *Gementee* Depok memiliki aparat untuk menjalankan kewenangannya itu. Struktur birokrasinya itu bertopang pada dua jalur, menyerupai dua jalur birokrasi Pemerintah Hindia Belanda.⁶ Ada jalur birokrasi tinggi yang dipegang oleh Orang Depok Asli, yakni pengurus badan pengelola tanah partikelir Depok yang dipilih oleh dan dari kalangan mereka: ketua badan yang bergelar presiden, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan dua orang anggota. Sedangkan posisi yang diisi oleh Pribumi Depok adalah kepala polisi, juragan, dan mandor. Kepala polisi adalah petugas badan pengurus tanah partikelir Depok yang bertanggung jawab menjaga keamanan seluruh wilayah tanah partikelir. Juragan adalah kepala yang mengatur administrasi pemerintahan wilayah, juga bertindak sebagai kepala mandor dari desa-desa sekitarnya yang dihuni oleh Pribumi Depok yang muslim. Sedangkan mandor (berjumlah sembilan) sendiri adalah kepala komunitas Pribumi Depok. Kepala Polisi dan Juragan diangkat atas usul badan pengurus tanah partikelir Depok dan disahkan oleh Asisten Residen di *Buitenzorg*. Tugas mereka adalah membantu badan pengurus tanah partikelir dalam bidang kepolisian, penarikan pajak (*cuke*), pengerahan penduduk (*herediensten*), dan kewajiban menanam komoditi (*contingenten*) (Nirmalawati, 1990: 32, Pemerintah Kota Depok, 1999).

Dalam kerangka penarikan pajak, Pribumi Depok dikenakan membayar seperlima dari hasil tanaman mereka untuk kegiatan

tanah maupun dalam bentuk tindak penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparatnya. Ia mencatat adanya sewa tanah, pajak pohon dan pemanfaatan lahan, pajak penangkapan ikan dan pajak pengairan, pajak pesta (khususnya pesta juragan dan mandor), dan pajak pasar.

⁶ Mengenai sistem dua jalur birokrasi di era Pemerintahan Hindia Belanda, lihat Legge, 1961.

pemerintahan *gemente bestuur* di atas. Sedangkan Orang Depok Asli hanya dikenakan sepersepuluh dari hasil tanaman mereka. Dari segi ini, tampak adanya diskriminasi administrasi. Orang Depok Asli yang dianggap sebagai pemilik sah tanah partikelir Depok diberi beban pajak yang jauh lebih rendah, sebanding dengan *privilege* mereka yang dapat dipilih menjadi anggota badan pemerintahan tanah partikelir. Sementara Pribumi Depok tidak dapat menduduki jabatan tersebut, dan hanya diperlakukan semata-mata sebagai sumber pendapatan dan sumber tenaga kerja saja.

Selain itu, Pribumi Depok pun berada di bawah kendali Orang Depok Asli secara perorangan. Sebagian besar Pribumi Depok mengerjakan tanah milik Orang Depok Asli khususnya dengan sistem bagi hasil. Pola hubungan yang terbangun berbentuk *patron-client*: Pribumi Depok menganggap Orang Depok Asli sebagai tuannya (Marzali, 1975). Oleh karena itu, demi menjaga hubungan *parton-client* tadi, Pribumi Depok terkadang juga menyerahkan sebagian tenaga kerjanya kepada tuannya itu secara sukarela.

Dalam konteks demikian, pola penyedotan surplus dari Pribumi Depok yang sistemik di atas mengukuhkan integrasi Pribumi Depok dalam sistem sosial ekonomi tanah partikelir, dan lagi-lagi, membuat Pribumi Depok pun terintegrasi dalam sistem sosial ekonomi kapitalis yang lebih luas. Selain itu bentuk integrasi Pribumi Depok dalam sistem kapitalis lainnya adalah melalui kerja upahan. Hal ini terutama dialami oleh sebagian Pribumi Depok yang bekerja di perkebunan kopi --dan belakangan karet -- yang dibayar dengan sistem upah. Dalam kaitan ini berlangsung proses monetisasi dalam sistem ekonomi sehari-hari Pribumi Depok, dan faktor inilah yang semakin mengukuhkan integrasi Pribumi Depok ke dalam sistem ekonomi yang lebih luas. Sebagaimana diketahui, pada masa itu tanah partikelir merupakan salah satu penyangga ekonomi Hindia Belanda. Sehingga tidak berlebihan bila dikatakan bahwa sesungguhnya Pribumi Depok pun memberikan sumbangan yang tidak kecil bagi ekonomi Hindia Belanda.⁷

⁷ Indikator lain untuk menunjukkan betapa terintegrasinya sistem sosial ekonomi tanah partikelir Depok ke dalam sistem ekonomi Hindia Belanda, adalah munculnya pelapisan sosial baru di kalangan Orang Depok Asli sebagaimana dikemukakan dalam catatan kaki No. 4. Dalam konteks ini,

Jatuh dalam Depresi Ekonomi

Posisi pribumi di tanah partikelir yang selalu terjepit di atas, semakin mengkhawatirkan ketika depresi tahun 1930-an. Nilai jual komoditi perkebunan dan pertanian anjlok. Dalam situasi tersebut, kerja upahan yang berfungsi menyediakan uang tunai untuk membayar pajak dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Pribumi Depok menjadi terhenti. Meski demikian, Pribumi Depok tetap saja diwajibkan membayar pajak-pajak tertentu kepada badan pengurus tanah partikelir Depok. Dapat diduga bahwa Pribumi Depok pun mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana secara makro tergambar dalam Tabel 1 dan 2. Ibarat sudah jatuh karena dieksploitasi, mereka pun tertimpah tangga, terkena imbas Malaise. Jadi, tahun 1930 dapat dianggap sebagai catatan awal penting untuk memotret kehidupan sosial ekonomi Pribumi Depok.

dapat diduga bahwa ketika terjadi gejolak ekonomi di tingkat global yang mempengaruhi sistem ekonomi Hindia Belanda --sebagai bagian dari faktor produksi tanah partikelir Depok-- Pribumi Depok pun turut terpukul. Untuk argumen tentang penetrasi kapitalis global terhadap kehidupan sosial ekonomi lokal Depok, lihat Suryana, 2003.

Tabel 1
Perbandingan Pengeluaran dan Penerimaan
Petani Jawa Sebelum dan Pada Saat Malaise

Penerimaan		Pengeluaran		
	1930		1925	1930
Hasil padi, jagung, dan umbi-umbian yang dijual	f.12	Pajak tanah dan pajak lain	f.7	f.7
Pendapatan dari tanaman lain	f.8	Garam, minyak tanah, dan tembakau	f.4	f.3
Pendapatan-pendapatan lain	f.2	Pakaian	f.2	f.1
Penjualan padi ekstra	f.3	Benih dan barang-barang keperluan rumah tangga	f.12	f.8
		Bahan makanan, bumbu, dan ikan	f.5	--
		Membeli beras kembali	f.2	--
		Bunga hutang	f.2	f.3
Total	f.25	Total	f.34	f.25

Sumber : de Vries (1985:82) dikutip Abidin (1990)

Tabel 2
Persentase Rata-rata Pinjaman Setiap Rumah Tangga di Jawa
Tahun 1932-1933

	1932				1933			
	Total	Innatura	Uang	% total	Total	Innatura	Uang	% total
Pangkalan biasa (dari milik sendiri/usaha)	>f.171	f.57	f.114	66%	f.76	f.28	f.48	63 %
Penghasilan luar (Pinjaman dan Penerimaan lain-lain)	>f.62	f.2	f.60	95%	f.26	f.1,50	>f.24	94 %

Sumber : Djoyohadikusumo (1989: 7) dikutip Abidin (1990: 69).

Dapat pula diduga bahwa sebagian tanah partikelir Depok pada tahun 1930-an telah menjadi perkebunan karet, menggantikan perkebunan kopi dan lada yang menjadi primadona Depok sejak Chastelein masih hidup.⁸ Bila dugaan ini benar, maka karet masuk ke tanah partikelir Depok ketika komoditi perkebunan ini sedang merayap menjadi primadona ekonomi Hindia Belanda. Sejak tahun 1920, produksi karet telah melampaui komoditi lain, seperti gula, kopi, teh, dan tembakau (lihat tabel 3).

Tabel 3
Perkembangan Perekonomian Hindia Belanda
Menurut Luas Areal Tanah Perkebunan di Jawa (ha)

Tahun	Gula	Kopi	Teh	Karet	Tembakau
1895	77.116	-	917a	-	71.792
1900	91.049	-	n.a	-	93.768
1905	105.761	79.706b	n.a	10.117c	137.346
1910	126.525	51.231b	49.439	63.943	151.533
1915	151.165	33.053b	73.886	109.215	159.484
1920	153.366	105.886	78.247	157.299	129.302
1925	176.267	95.367	84.682	180.478	165.261
1930	198.007	97.520	98.589	228.923	182.169

Keterangan:

- a. Mencakup perkebunan dan petani kecil
- b. Hanya yang ditanam Pemerintah
- c. Data tahun 1906

Sumber : Booth et.al., (1988: 221) dikutip Abidin, (1990: 2).

Meluasnya perkebunan karet di Pulau Jawa umumnya, khususnya di *Omlanden Batavia*, terkait dengan meningkatnya ekspor karet berkenaan dengan tumbuhnya industri ban mobil, khususnya *Goodyears* (1839) dan *Dunlop* (1888). Industri otomotif ini bahkan melaju sangat cepat pada tahun 1900-1914. Faktor inilah yang agaknya membuat Badan Pengurus Tanah Partikelir dan Orang Depok Asli membuka perkebunan karet – untuk menggantikan kopi dan lada—di Tanah Partikelir Depok.

⁸ Dugaan ini terbangun karena menurut pelbagai sumber informasi bahwa wilayah yang sekarang menjadi Perumnas – dahulunya termasuk wilayah Tanah Partikelir Depok – sebelumnya adalah perkebunan karet.

Tabel 4 memperlihatkan dinamika pertumbuhan karet dari tahun 1938-1953. Tampak bahwa pertumbuhan karet sangat meyakinkan, kecuali tahun 1950 ketika banyak perkebunan karet masih terbengkalai. Setelah tahun 1950, produksi karet meningkat tajam. Hal tersebut terkait erat dengan tuntutan *boom* ekspor karet akibat Perang Korea (1950-1953) (Silitonga, 1994). Selain itu, perkebunan-perkebunan karet yang pada masa Jepang dan Revolusi tidak dipelihara, mulai berproduksi kembali karena telah dikelola oleh pemiliknya seperti zaman Hindia Belanda.⁹

Tabel 4
Produksi Karet Alam Indonesia

Tahun	Karet Perkebunan	Karet Rakyat	Total
1938	175.078	146.596	321.674
1939	198.086	184.947	383.033
1940	282.669	266.277	548.946
1950	178.076	529.687	707.763
1951	226.383	593.187	819.570
1952	299.387	497.403	796.790
1953	309.185	418.899	728.084

Sumber: Biro Pusat Statistik, (1962:17) dikutip Silitonga (1994: 85).

Keberadaan komoditi karet dalam sistem ekonomi tanah partikelir Depok semakin memperkuat integrasi tanah partikelir ini terhadap sistem ekonomi yang lebih luas. Kelak, ketika posisi sosial politik Pribumi Depok meningkat, apalagi setelah tanah partikelir Depok dihapuskan pada tahun 1952, kita dapat menduga bahwa *boom* karet tersebut sedikit-banyaknya akan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi Pribumi Depok pasca kemerdekaan.

Situasi Penuh Harapan

Memasuki pendudukan Jepang, terjadi pembalikan struktur sosial di tanah partikelir Depok. Semua status simbol yang begitu

⁹ Mengenai kembalinya perusahaan Belanda untuk berproduksi di Indonesia pada awal tahun 1950-an, lihat Kanumoyoso, 2000.

dibangga-banggakan di era kolonial Belanda, menjadi simbol pariah. Komunitas Depok Asli pun secara dramatis menjadi strata terbawah dalam sistem sosial Depok saat itu. Kita belum mengetahui secara pasti bagaimana tindakan Pribumi Depok terhadap Orang Depok asli saat *angin surga* berpaling kepada mereka. Meski demikian, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan hipotesis. Bagaimana pola penguasaan tanah Pribumi Depok ketika sistem tanah partikelir Depok yang dibangun berabad-abad itu secara tiba-tiba lenyap, digantikan oleh fasisme pemerintahan pendudukan Jepang? Bagaimana pula bentuk organisasi sosial Pribumi Depok saat itu? Apakah para Pribumi Depok masih melanjutkan sistem sosial lama dengan menekankan pada kepemimpinan para mandor?

Era pendudukan Jepang sampai kemerdekaan merupakan fase kenaikan posisi sosial-politik Pribumi Depok. Hal itu ditandai oleh upaya sebagian kaum muda Pribumi Depok untuk mengambil alih kekuasaan dari Pemerintah Pendudukan Jepang. Catatan resmi Pemerintah Kota Depok menyebutkan ada sekitar 21 pemuda yang dipimpin oleh Tole Iskandar yang memelopori pengambilalihan kekuasaan tersebut. Mereka adalah Tole Iskandar, Abdoelah, Saijan, Sainan, Sinan, Salam, A. Niran, Saidi Bontjet, Idan Saijan, Tamin, Joesoep, Salam, B. Baoeng, Mahroep, Muhasim, Hasbi, Rodjak, Tarip, Kosim, Nadjid, dan Mamoen (Pemerintah Kota Depok, 1999).

Semangat untuk mengambil alih kekuasaan itu pula yang melahirkan peristiwa November 1946. Pribumi Depok yang berada di tanah partikelir Depok dan Pondok Cina¹⁰ menyerang permukiman Orang Depok Asli. Dalam penyerangan tersebut, patung Chastelein yang dipersepsi sebagai simbol penindasan dihancurkan. Beberapa rumah Orang Depok Asli juga dibakar. Konflik saat itu tidak saja merupakan perwujudan sakit hati pada era sebelumnya, tetapi juga berkait-erat dengan masalah politik. Karena, sebagai salah satu upaya mengembalikan kejayaan mereka seperti era kolonial Belanda, Orang Depok Asli memihak tentara NICA Belanda (Marzali, 1975).

¹⁰ Keterlibatan kalangan pribumi di tanah Partikelir Pondok Cina, tetangga bagian utara Tanah Partikelir Depok, diperoleh dari wawancara sambil lalu dengan istri Mantan Kepala Desa Kukusan Kecamatan Beji, tahun 1996. Rupanya walau secara administratif berbeda, mereka ternyata memiliki jaringan dan ikatan emosional yang kuat.

Peristiwa tragis ini menandakan perubahan mendasar pada struktur sosial penduduk tanah partikelir Depok. Orang Depok Asli mengalami trauma yang mendalam dan bersikap apatis dalam tatanan sosial yang terbentuk pasca kemerdekaan (Marzali, 1975). Apalagi saat tanah partikelir Depok dihapuskan pada tahun 1952¹¹, semakin menyurutkan peran sosial ekonomi dan politik Orang Depok Asli, karena mereka tidak memiliki perangkat politik-administratif seperti era kolonial Belanda lagi.

Status administratif Depok pun berubah, menjadi salah satu kecamatan di bawah Kawedanaan Parung Kabupaten Bogor. Dalam konteks ini, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan hipotesis. Bagaimana status dan pola kepemilikan tanah partikelir Depok setelah tanah partikelir dihapuskan baik secara *de facto* maupun secara *de jure*? Bagaimana pula tatanan sosial Pribumi Depok pasca penghapusan tanah partikelir Depok tersebut? Apakah tatanan sosial pasca penghapusan masih melanjutkan sistem lama? Mandor misalnya, masihkah mereka menjadi pemimpin perkampungan Pribumi Depok?

Kita pun menduga kalau ada komponen tatanan sosial yang berlanjut, tentu hal itu terlebih dahulu disesuaikan dengan alam kemerdekaan. Nama mandor, misalnya, kemungkinan besar diganti menjadi kepala desa. Selain itu, apakah elit pribumi lama yang telah terbentuk berabad-abad itu masih memegang kendali kepemimpinan atas komunitas Pribumi Depok? Ataukah, mereka sudah berganti dengan elit baru yang terbentuk secara cepat dalam era Revolusi? Apa dampak *boom* karet 1950-1953 terhadap kehidupan sosial ekonomi Pribumi Depok? Bagaimana pula kondisi karet perkebunan dan karet rakyat di Depok pasca penghapusan tanah partikelir? Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan itu kelak dapat kita peroleh jawabannya.

¹¹ Secara resmi tanah partikelir Depok dibubarkan pada tanggal 4 Agustus 1952. Menurut catatan resmi Pemerintah Kota Depok, pembubaran tanah partikelir Depok tersebut bersifat sukarela, sebagai konsekuensi Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1949 tentang penghapusan sistem tanah partikelir di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Penyerahan itu dilakukan setelah perundingan berkali-kali baik di Depok maupun di Jakarta, dan syahkan oleh Akte Notaris Soerojo No. 18. Lihat Pemerintah Kota Depok, 1999.

Penutup

Uraian di atas menunjukkan pola penyesuaian yang dilakukan Pribumi Depok tatkala mereka harus memberikan respon terhadap perubahan sosial yang terjadi. Uraian di atas juga mengisyaratkan bahwa sebagai *peasant* (harfiah petani) --sebagaimana ditunjukkan oleh Scott (1981) -- apa yang dilakukan Pribumi Depok itu amat bertumpu kepada etika subsistensi. Etika ini merupakan sudut pandang sekaligus tolok ukur perilaku mereka yang dilandaskan pada prinsip pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Prinsip inilah yang agaknya mereka jadikan pedoman tatkala melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan mendasar dalam kurun tahun 1930-1960.

Dalam konteks setiap era, etika subsistensi ini pula yang mereka jadikan pedoman dalam merespon sistem sosial ekonomi yang menindas mereka.¹² Mereka misalnya, sangat hati-hati untuk melawan sistem tanah partikelir Depok baik terhadap Orang Depok Asli secara perorangan maupun terhadap Badan Pengurus Tanah Partikelir Depok. Hal yang sama juga terjadi pada era pendudukan Jepang. Pribumi Depok mulai mengungkit pelbagai perilaku Orang Depok Asli dan Badan Pengurus Tanah Partikelir, yang semula dianggap sebagai hal yang wajar. Perubahan definisi sosial tersebut terkait dengan resiko minimal yang mereka akan terima karena adanya angin politik yang memihak mereka. Jepang sangat membenci semua yang berbau Belanda, dan sebaliknya mulai memberi ruang yang lebih luas terhadap kaum Pribumi.

Demikian pula ketika Orang Depok Asli memihak NICA Belanda karena ingin menghidupkan kembali sistem tanah partikelir Depok, Pribumi Depok mati-matian melawannya. Demi eksistensinya itu, bahkan mereka menyerang perkampungan Orang Depok Asli terlebih dahulu, dan menghancurkan simbol-simbol eksploitasi di masa kolonial Belanda. Mereka melakukan tindakan penyerangan tersebut karena resikonya jauh lebih rendah dari pada hidup kembali dalam sistem tanah partikelir yang eksploitatif.

¹² Untuk ilustrasi bagaimana *peasant* melakukan perlawanan sosial yang bertumpu pada etika subsistensi ini, lihat Scott, 2000; bandingkan dengan Iskandar, 1982 dan Anwar, 1990.

Perjuangan mereka itu tidak sia-sia. Secara *de facto*, sistem tanah partikelir tidak pernah hidup kembali. Bahkan pada tahun 1952, secara *de jure*, Badan Pengurus Tanah Partikelir Depok secara suka rela menyerahkan tanah partikelir Depok kepada Pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan ini dilakukan tanpa gejolak dan dilakukan setelah pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintah No. 1/1949 tentang penghapusan tanah partikelir.

Daftar Pustaka

- Abidin, Moh. Jenal, 1990, *Depresi Ekonomi 1930-35 dan Pengaruhnya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Jawa*, Skripsi Sarjana Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Anwar, Ali, 1990, *Gerakan Protes Petani Bekasi 1913: SI di Tanah Partikelir*, Skripsi Sarjana Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Biro Pusat Statistik, 1962, "Statistik Karet (Rubber Statistics) Indonesia 1962", dikutip Silitonga, Imelda, 1994, *Boom Eksport Karet 1950-53*, Depok: Skripsi Sarjana Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Booth, Anne et.al., 1988, "Sejarah Ekonomi Indonesia", Jakarta: LP3ES dikutip Abidin, Moh. Jenal, 1990, *Depresi Ekonomi 1930-35 dan Pengaruhnya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Jawa*, Skripsi Sarjana Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Castles, Lance, 1967, "The Ethnic Profile of Djakarta", *Indonesia Vo. 1* (April), Itacha: Modern Indonesia Project Cornell University.
- Dagun, Save M., 1997, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara.
- Damanik, Ali Said, 2002, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Bandung: Teraju.

- Danasasmita, Saleh, 1983, *Sejarah Bogor: Bagian I*, Bogor: Pemerintah Daerah Kotamadya II Bogor.
- de Vries, Egbert, 1985, *Pertanian dan Kemiskinan di Jawa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, dikutip dari Abidin, Moh. Jenal, 1990, *Depresi Ekonomi 1930-35 dan Pengaruhnya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Jawa*, Skripsi Sarjana Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Djoyohadikusumo, Sumitro, 1989, "Kredit Rakyat di Masa Depresi", Jakarta: LP3ES, dikutip Abidin, Moh. Jenal, 1990, *Depresi Ekonomi 1930-35 dan Pengaruhnya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Jawa*, Skripsi Sarjana Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Djumhur, 1996, "Sekilas Sejarah Depok", dalam Pemerintah Kota Administratif Depok, *Info Depok-6*.
- Iskandar, 1982, *Ciomas 1886: Suatu Pemberontakan Petani di Tanah Partikelir*, Depok: Skripsi Sarjana Sejarah FSUI.
- Kano, Hiroyoshi, 2004, "Tama and Depok: Comparative Anatomy of Suburban New Towns in Tokyo and Jakarta", dalam Hiroyos Kano, *The Growing Metropolitan Suburbia: Comparative Studt in Tokyo and Jakarta*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kanumoyoso, Bondan, 2000, *Menguatnya Peran Ekonomi Negara: Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda 1957-1959*, Depok: Tesis Pasca Sarjana Fakultas Sastra UI.
- Kembali, Urip Hardiman, 1990, *Status dan Kondisi Tanah Partikelir Buitenzorg 1929*, Depok: Skripsi Sarjana Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Pemerintah Kota Depok, 1999, *Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Depok No. 1/1999 tentang Sejarah Singkat Kota Depok*, Depok: Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Depok.

- Legge, J.D., 1961, *Central Authority and Regional Autonomy in Indonesia: A Study in Local Administration 1950-1960*, New York: Cornell University Press.
- Marzali, Amri, 1975, "Krisis Identitas Pada Orang Depok Asli", dalam *Berita Antropologi*. Jurusan Antropologi Universitas Indonesia.
- Nirmalawati, Prima Duria, 1990, *Pengaruh Pendidikan Barat pada Orang Depok Asli*, Depok: Skripsi Sarjana Jurusan Sejarah FSUI.
- Partrijunianti, Endang MA., et.al., 1992, *Profil Wanita Betawi di Desa Grogol yang Bekerja Sebagai Pembantu Rumah Tangga: Studi Kasus: di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat*, Depok: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia.
- Poernomo, Indria Kartini, 1994, *Keluarga Orang Depok Asli: Suatu Kajian Terhadap Identitas Etnis Orang Depok Asli di Kelurahan Depok*, Depok: Skripsi Sarjana Jurusan Antropologi FISIP-UI.
- , Sri Murniati (1990): *Gereja Immanuel Depok: Suatu Penelitian Pendahuluan*. Depok: Skripsi Sarjana Jurusan Arkeologi FSUI.
- Silitonga, Imelda, 1994, *Boom Eksport Karet 1950-53*, Depok: Skripsi Sarjana Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Scott, James C., 1981, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, terjemahan Hasan Basari, Jakarta: LP3ES.
- , 2000, *Senjatanya Orang-orang yang Kalah: Bentuk-bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Petani*, terjemahan Rahman Zaenuddin et.al., Jakarta: Yayasan Obor.
- Stein, Jess dan Laurence Urdang (editors), 1968, *The Random House Dictionary of The English Language*, New York: Random House

Suryana, Asep, 2003, "Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat Depok: Dari Pembagian Kerja Internasional Menuju Suburbanisasi Jakarta", *Jurnal Masyarakat No. 12*, Depok: Laboratorium Sosiologi FISIP UI.

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.